



419 Perbup Badung

Tanpa

Klarifikasi Gubernur

★ 220 Toko Modern Ilegal di Badung Juga Disorot

Gubernur Pastika minta Badung segera terapkan PHR Online Penuh di seluruh hotel dan restoran yang ada

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika soroti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dijalankan di Badung selama periode 2010-2015. Masalahnya, ada 67 Perda dan 419 Perbup Badung yang tidak melalui proses klarifikasi ke Gubernur. yang tak kalah mengejutkan, ada 220 toko modern ilegal dan

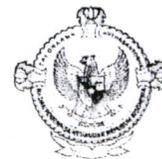
Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Gubernur Pastika saat asistensi ke Pemkab Badung, Senin (31/8).

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

419 Perbup Badung Tanpa Klarifikasi Gubernur

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

246 titik reklame ilegal dibiarkan tanpa penindakan.

Masalah 67 Perda dan 419 Perbup yang tanpa melalui proses klarifikasi itu disampaikan Gubernur Pastika saat melakukan kegiatan asistensi ke Pemkab Badung di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung di Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Senin (31/8). Dalam acara tersebut, Gubernur Pastika didampingi Wagub Bali Ketut Sudikerta dan jajarannya. Sedangkan Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka didampingi Ketua DPRD Badung, Nyoman Giri Prasta.

Gubernur Pastika menyatakan keheranannya dengan pelaksanaan 67 Perda dan 419 Perbup Badung yang tanpa proses klarifikasi. "Ternyata masih banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang belum mendapat tanda klarifikasi dari Gubernur. Selama periode 2010-2015, terdapat 67 Perda dan 419 Perbup di Badung yang belum dapat tanda klarifikasi dari Gubernur. Jadi, selama ini apa dasar saudara bekerja?" ujar Pastika saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Pemkab Badung.

Pastika pun meminta untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi terhadap Perda dan Perbup di Badung yang belum mendapat klarifikasi Gubernur tersebut. Dengan begitu, kedepannya para staf yang bekerja memiliki dasar hukum yang kuat. "Jangan sampai staf itu bekerja tanpa menggunakan dasar hukum yang benar dan tidak mengikuti prosedur, kasih mereka," katanya.

Bukan hanya itu, Pastika juga menyoroti keberadaan Sat Pol PP Kabupaten Badung yang sampai saat ini dianggap belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP). "Di sini dilaporkan belum ada SOP penegakan Perda, SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, SOP pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan, SOP pengawalan pejabat, SOP pelaksanaan tempat-tempat tertib. Saya minta tolong ini segera diselesaikan," tegas Pastika.

Pastika menginstruksikan agar SOP tersebut segera dirancang, sehingga mampu mengamankan dan menertibkan keberadaan 220 toko modern dan 246 titik reklame yang belum memiliki izin alias ilegal di wilayah Badung. "Ke depannya, saya harap ini segera diselesaikan."

Badung juga diminta segera menerapkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Online Penuh di seluruh hotel dan restoran yang ada. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh dengan lebih cepat. "Saya minta Kadispenda untuk segera menerapkan PHR Online, dalam upaya meningkatkan pendapatan buat mensejahterakan masyarakat," tandas Pastika.

Ditemui NusaBali sesuai arahan di Puspem Badung, Senin kemarin, Pastika kembali menyebutkan ada 67 Perda dan 419 Perbup yang seharusnya dimintakan klarifikasi ke Gubernur, tapi itu tidak dilakukan. "Ada yang salah berjalan selama ini dan dibiarkan begitu saja," sesal Pastika.

Menurut Pastika, dalam



sambungan...

tata pemerintahan, sebuah produk aturan seperti Perda dan Perbup wajib dimintakan klarifikasi kepada pemerintahan setingkat lebih tinggi di atasnya. Kalau tidak, bisa dikategorikan melanggar Undang-undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

"Kalau kami di provinsi, selalu minta klarifikasi ke pemerintah pusat. Itu rutin saya sampaikan di sidang paripurna ketika Perda yang kita susun ketok palu. Tapi, di Badung ini tidak. Ada 419 Perbup dan 67 Perda yang tidak dimintakan klarifikasi. Gila itu, sangat berani," ujar Pastika saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar.

Pastika mempertanyakan adanya 220 usaha toko modern ilegal dan 246 titik reklame ilegal yang seharusnya ditertibkan, namun tidak dilakukan Sat Pol PP Badung hingga sekarang. "Saya kaget. Saya ingatkan Penjabat Bupati Badung (Nyoman Harry Yudha Saka) supaya pahami semua itu. Ada 220 toko morden dan 246 titik reklame tanpa izin, tapi tidak ada tindakan," ujar mantan Kapolda Bali ini.

Menurut Pastika, biasanya staf di pemerintahan juga sering menyodorkan hal-hal yang menyerempet bahaya dan menjebak pejabatnya. "Penjabat Bupati Badung yang saya tunjuk ini kan ibarat murid yang ditugaskan turun gunung dari padepokan. Dia belum paham semua situasi. Saya sudah ingatkan, jangan asal teken saja, nanti bisa kena masalah," ujar Pastika yang dalam setiap acara simakrama selalu menerima pengaduan

soal menjamurnya toko modern, namun tidak bisa melarang keberadaannya karena itu kewenangan Bupati/Walikota.

Turunnya Pastika ke Badung, Senin kemarin, menjadi perbincangan hangat para pejabat di lingkup pemkab Badung dan DPRD Badung. Apa yang diungkapkan Pastika bahkan ada yang menulis di status BBM. Pastika disebut mulang (menjatuhkan) 'bom' dengan pernyataan-pernyataannya yang mengungkap data soal pelaksanaan pemerintahan di kabupaten terkaya se-Bali tersebut.

Sementara itu, Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, dalam laporannya saat menerima kunjungan Gubernur Pastika di Puspem, Senin kemarin, menyatakan pihaknya telah berupaya untuk melaksanakan 3 tugas pokok sebagai Penjabat Bupati. Pertama, menjalankan roda pemerintahan sehingga tidak terjadi stagnasi pemerintahan. Kedua, menjaga netralitas PNS. Ketiga, memfasilitasi jalannya Pilkada Badung 2015.

Terkait jalannya pemerintahan di badung, Yuda Saka menyatakan pihaknya telah melaksanakan konsolidasi dan kunjungan ke setiap SKPD. Tujuannya, untuk memastikan, mensinergikan, dan menyamakan persepsi mengenai program-program yang sudah atau belum dijalankan, agar selalu berkesinambungan dengan target dan rencana yang ditetapkan.

Terkait pelaksanaan Pilkada Badung, 9 Desember 2015 mendatang, dan juga netralitas PNS, Yuda Saka mengaku telah menerbitkan Instruksi Bupati tentang Netralitas PNS. **as,nat**

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 15



BLH Turun Cek Limbah RSUD Bangli

Petugas
BLH saat
mengecek
kondisi
lingkungan di
RSUD Bangli,
Senin (31/8)



• NUSABALI/DEWA

BANGLI, NusaBali

Terungkapnya keluhan warga akan dugaan pembuangan limbah cair bercampur tinja ke got yang dilakukan oleh pihak RSUD Bangli, langsung direspons oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangli. Dengan dikordinir oleh Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan, I Gusti Ngurah Laksana, mereka langsung meninjau got yang menjadi tempat pembuangan limbah tersebut, Senin (31/8).

Penelusuran yang dilakukan dengan melibatkan tim dan sejumlah petugas, langsung meninjau lokasi got yang disebutkan oleh media sebagai tempat pembuangan limbah cair campur tinja yang bersumber dari toilet umum. "Ketika kami cek got yang ada dibelakang toilet, memang kami temukan adanya kotoran manusia di got," ujarnya.

Setelah diperiksa limbah tersebut bukan berasal dari pipa WC yang bocor. Dia juga tidak tahu apakah setelah ada

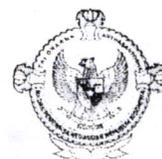
pemberitaan di media langsung dilakukan perbaikan terhadap pipa yang menghubungkan jamban dengan tempat penampungan. "Yang jelas saat kita periksa pipa pembuangan itu memang tidak ada yang bocor," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gusti Laksana, juga meminta penjelasan kepada RS, tentang permasalahan tersebut pada salah seorang Kabid yang membidangi lingkungan di RSUD Bangli. Diperoleh informasi kalau kotoran manusia itu ada di got lebih disebabkan karena keadaan darurat. "Kemungkinan saat pagi buta, ada penunggu pasien yang kebelet, sementara toilet umum belum buka. Sehingga mereka mungkin membuang air di got belakang toilet," ujar Gusti Laksana.

Meskipun demikian, kata dia, sebagai penanggung jawab terhadap kebersihan toilet adalah pihak ketiga selaku pemenang tender. "Pihak ketiga juga mesti bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi," ujarnya. **cr53**

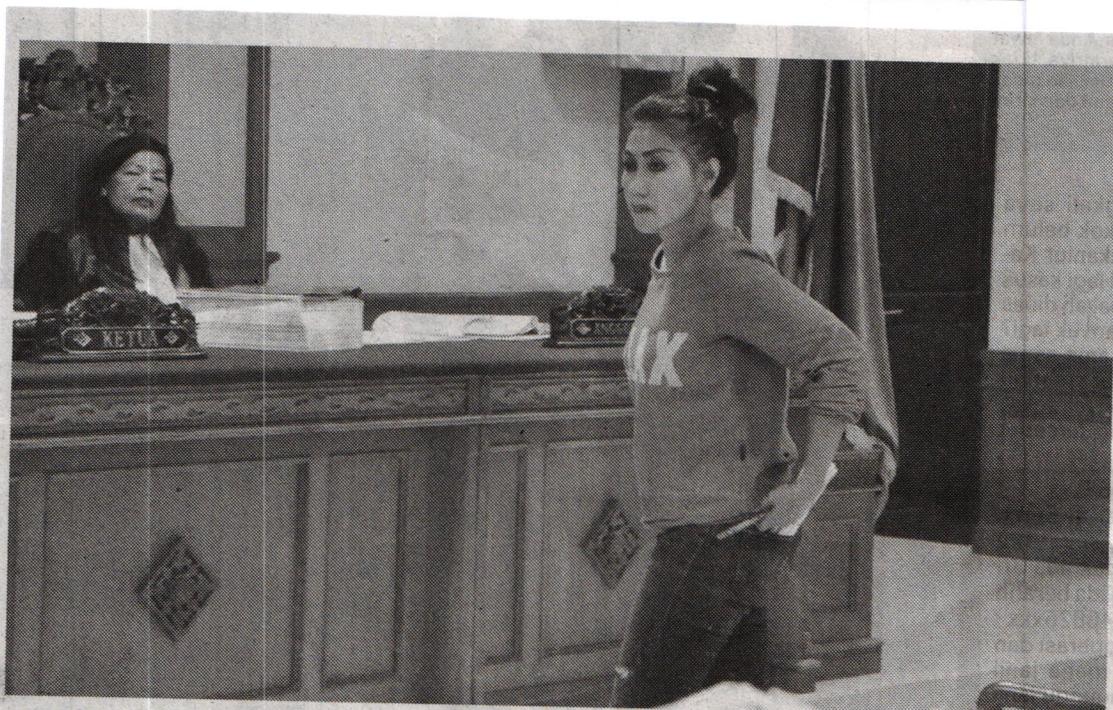
Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 8



Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih, Buleleng

Dilimpahkan, Kontraktor Cantik Segera Disidang



TERSANGKA, Aristya Agustina saat bersaksi untuk terdakwa I Nyoman Suitra di Pengadilan Tipikor Denpasar, 10 Agustus lalu. • NUSABALI/YUDA

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 2



DENPASAR, NusaBali

Berkas dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), I Wayan Wenten dan rekanan, Aristya Agustina dilimpahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Salah satu tim JPU, AA Alit Swastika mengatakan Wenten yang merupakan PPTK sekaligus sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Buleleng yang menangani proyek pembuatan jembatan di Desa Lemukih, Buleleng serta rekanan yang menggarap proyek, Aristya resmi dilimpahkan, Senin (31/8). "Sudah resmi kami limpahkan hari ini," jelas Alit.

Untuk kedua tersangka ini juga sudah dibentuk tim jaksa yang akan menangani proses selanjutnya. Untuk tersangka Aristya, jaksanya Gung Alit,

Wayan Meret dan Made Mudita. Kemudian untuk tersangka Wenten, jaksanya adalah Ketut Sujaya, Surasmi dan

Novalitas. Sementara, satu tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PU Buleleng, Nyoman Yasa masih dalam tahap

penyidikan di Polda Bali. Sedangkan satu terdakwa, yaitu I Nyoman Suitra yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) sudah menjalani persidangan.

Dalam kasus ini, para terdakwa dan tersangka melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng. Modus yang digunakan PPK, PPTK bersama rekanan dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan ini.

Proses pembangunan jembatan tahap I yang seharusnya menyelesaikan 40 persen pembangunan, hanya diselesaikan 20 persen saja.

Namun dalam pertanggung jawabannya, para tersangka membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 669 juta. Sementara itu, dalam sidang terdakwa I Nyoman Suitra yang rencananya digelar, Senin (31/8) dengan agenda pembacaan tuntutan batal dilakukan. Sidang akan ditunda hingga, Senin (6/9) pekan depan. **rez**

Edisi : Selasa, 1 September 2013

Hal : 2



Gubernur Pastika Sidak BRW, Komisi I Desak Laporkan Pidana

DENPASAR, NusaBali

Temuan dewan terkait aksi penataan dan pengerukan tebing di kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, oleh PT Bali Raga Wisata (BRW) membuat Pemprov Bali meradang. Senin (31/8), Gubernur Made Mangku Pastika

sidak ke lokasi pengerukan yang ditengarai tidak mengantongi izin.

Pastika turun bersama Kasatpol PP Pemprov Bali Made Sukadana, Inspektur Pemprov Bali Ketut Teneng, dan sejumlah pejabat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sementara dari



● HUMAS PEMPROV BALI
GUBERNUR Made Mangku Pastika (dua dari kanan) sidak ke kawasan Pantai Pandawa di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Senin (31/8).

Desa Adat Kutuh hadir Bendesa Adat Kutuh I Made Wena.

Aksi pengerukan tebing seluas ratusan hektare ini ditengarai tidak mengantongi izin. Karena izinnya sudah kadaluwarsa Januari 2015 lalu. Namun belakangan masih tetap ada kegiatan pengerukan. Termasuk ketika disidak Komisi III DPRD Bali yang membidangi lingkungan hidup, beberapa waktu lalu.

Gubernur Pastika meminta BLH dan Satpol PP mengecek semua perizinan. Karena pemanfaatan lahan ratusan hektare tersebut terindikasi melanggar aturan. Kepala Inspektorat Pemprov Bali Ketut Teneng usai sidak, mengatakan, BLH diminta mengumpulkan data BRW. Kalau terbukti bisa dilaporkan ke polisi.

"Kalau pemanfaatan lahannya tidak jelas ada izin, BLH dan Satpol PP sudah diminta bertindak. Diminta mengecek peraturan yang dilanggar. Undang-undang apa saja yang dilanggar. Kalau terbukti, diminta segera laporkan ke polisi," ujar Teneng.

Teneng menyebutkan, Gubernur Pastika tidak hanya melakukan asistensi di Badung terkait dengan kasus BRW saja. Untuk kasus BRW sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, itu sudah menjadi ranah Pemprov Bali.

"Ini salah satu laporan dan temuan di lapangan. Makanya asistensi gubernur di daerah-daerah akan berlanjut. Untuk BRW, BLH dan Satpol PP diminta bertindak. Masalahnya pemanfaatan ratusan hektare lahan, dan tanpa izin," ucap mantan Karo Humas Pemprov Bali, ini.

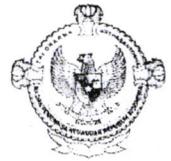
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali mendesak eksekutif dalam hal ini gubernur bertindak terkait dengan aksi penataan dan pengerukan tebing di kawasan Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tana Tenaya, secara terpisah mengatakan, BRW bisa dipidanakan karena melakukan penataan tanpa izin. "Kegiatan BRW adalah masuk kategori penambangan

liar karena izinnya tidak ada. Bisa dipidanakan itu. Bahkan kami dapat data mereka tidak mengantongi izin penataan tetapi malah sudah mengantongi izin mendirikan bangunan," tutur Tama Tenaya.

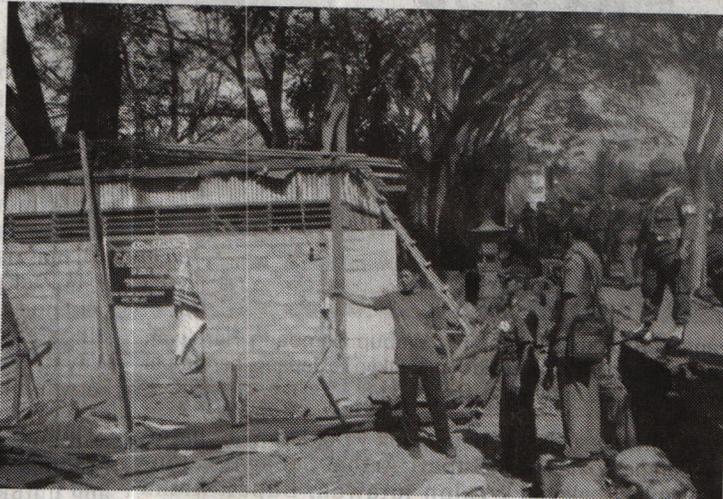
Politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, ini mengatakan, proyek penambangan seluas 155 ha itu akan merusak lingkungan. Termasuk mengancam keberadaan Pura Gunung Payung yang berada di satu kawasan penambangan. "Yang kami khawatirkan itu kawasan suci Pura Gunung Payung terganggu. Kadang masyarakat sekarang sulit masuk ke kawasan Pura Gunung Payung karena di pintu masuknya dijaga petugas keamanan dari PT BRW. Kami takut kejadian seperti di Nusa Dua, krama sulit masuk melakukan kegiatan melasti karena melewati areal hotel dan investor melarang. Sebelum terlambat harus dicegah hal ini," ujar Tama Tenaya. **nat**

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 2



Satpol PP Kosongkan 4 Bangunan di Lahan Pemerintah



Satpol PP kosongkan warung di lahan pemerintah di Jalan Diponegoro, Senin (31/8).
● NUSABALI/NANTRA

AMLAPURA, NusaBali Jajaran Satpol PP Pemkab Karangasem mengosongkan empat bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah. Pengosongan itu dilakukan menyusul rencana akan dibangunnya rumah dinas dokter di lahan itu. Pengosongan rumah berlangsung singkat, rumah paling terakhir yang dihuni I Nengah Simpen.

Kasat Pol PP Iwan Suparta yang memimpin acara itu, berlangsung kondusif di Jalan Diponegoro Am-

lapura atau selatan Tugu Pahlawan Ciung Wanara, Senin (31/8).

Hadir di lokasi I Nengah Simpen, mengaku mulanya mengontrak warung itu tahun 2007-2011 dari tangan Made Mudastra. Setelah mengetahui lahan ditempati milik pemerintah, maka I Nengah Simpen buru-buru membangun di sebelahnya. "Mulanya saya tidak tahu lahan di warung ini adalah milik pemerintah. Setelah saya tahu lahan pemerintah, saya membangun di sebelahnya," katanya.

Begitu dapat surat pemberitahuan dari pemerintah agar mengosongkan warung tersebut, I Nengah Simpen langsung memindahkan barang dagangannya, sejak Sabtu (29/8). Begitu petugas Satpol PP datang, warung telah kosong, berlanjut terjadi pembongkaran.

Bahkan warung di sebelahnya, sebelumnya dimanfaatkan tukang jok sepeda motor, Kopong, telah lama ditinggal. Sedangkan dua rumah di lahan pemerintah yang jadi satu areal, juga telah lama ditinggal penghuninya, yang pensiunan TNI.

Iwan Suparta merasa lega atas pengosongan lahan milik pemerintah, sehingga program ke depan hendak membangun perumahan dinas untuk dokter berjalan lancar. "Memang sebelum terjun ke lapangan, kami telah melayangkan surat ke penghuni warung agar melakukan pengosongan, dan kenyataannya penghuni warung mendahului mengosongkan isinya," kata Iwan Suparta.

Kedatangan petugas Satpol PP katanya, hanya mengecek kondisi di lapangan. Sebab, sebelumnya penghuni warung berjanji mengosongkan sendiri Senin (31/8). "Ternyata benar, warung telah kosong, tinggal meratakan tembok bangunan," tambah Iwan Suparta. **k16**

Edisi : Selasa, 7 September 2015

Hal : 8